

BAB I

PENDAHULUAN

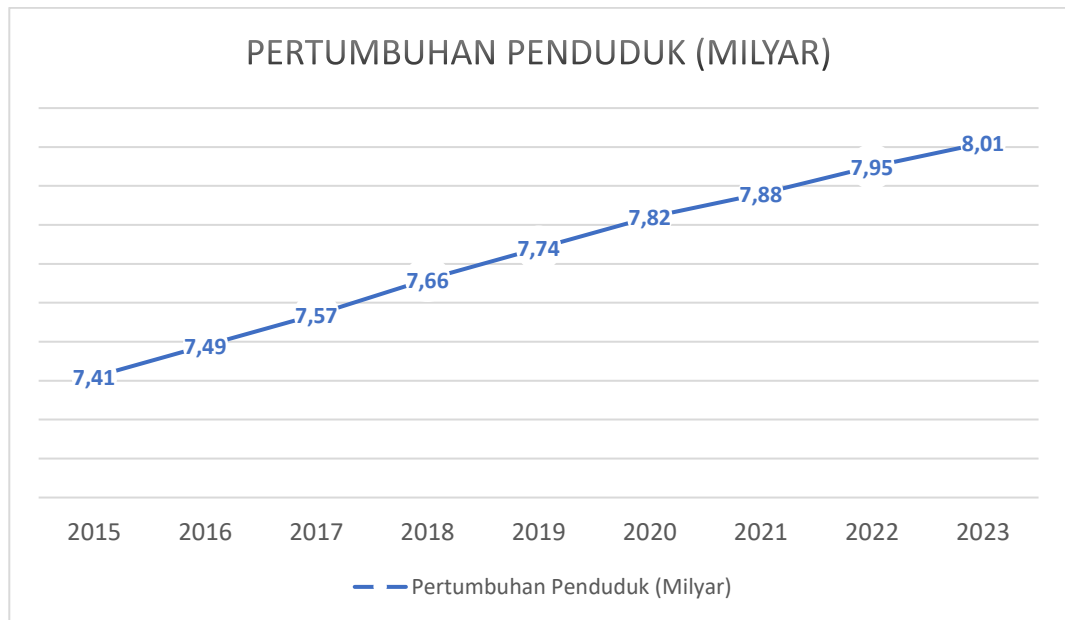
1.1 Latar Belakang

Overpopulasi mengacu pada pertumbuhan penduduk yang melonjak pesat dalam waktu yang relatif singkat, atau yang dapat dianggap sebagai ledakan penduduk, atau situasi ketika jumlah populasi manusia tumbuh melebihi daya dukung lingkungan. Dalam kondisi ini, overpopulasi dapat menyebabkan kekurangan sumber daya vital seperti transportasi, air, tempat tinggal, makanan, dan fasilitas sosial. Akibatnya, hal ini sering kali menyebabkan kerusakan lingkungan, penurunan kualitas hidup, atau bahkan keruntuhan populasi. Kesejahteraan penduduk suatu negara akan menurun jika laju pertumbuhan penduduk yang pesat tidak diimbangi dengan meningkatnya potensi perekonomian (Yunianto, 2021).

Populasi dunia tumbuh pada tingkat yang mengkhawatirkan, membahayakan kehidupan manusia dan mengakibatkan sejumlah permasalahan rumit yang mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan seperti ekonomi, politik, sosial, lingkungan hidup, dan banyak lagi. Ketidakseimbangan antara kepadatan penduduk, luas lahan, dan aksesibilitas sumber daya alam mungkin ada kaitannya dengan fenomena ledakan penduduk. Tanpa pengendalian, jumlah penduduk akan meningkat pesat melebihi jumlah sumber daya alam yang tersedia saat ini (Norrman, 2023).

Saat ini terdapat lebih dari 8 miliar orang di planet ini. Faktanya, PBB memproyeksikan bahwa pada tahun 2100, akan ada 10,8 miliar penduduk bumi. Hal ini mengasumsikan bahwa sebagian besar negara akan mengalami penurunan kesuburan secara konsisten. Menarik untuk dicatat bahwa populasi pada tahun 2100 bisa turun menjadi 7,3 miliar jika perempuan terus maju dalam menentukan nasib sendiri dan kesuburan menurun lebih dari perkiraan PBB. Populasi dunia kini bertambah setiap

tahunnya sebanyak 80 juta orang, sementara cadangan sumber daya tak terbarukan dalam jumlah besar semakin menipis. Tren yang tidak berkelanjutan ini disebabkan oleh sejumlah variabel, seperti menurunnya angka kematian, rendahnya penggunaan alat kontrasepsi, dan rendahnya tingkat pendidikan anak perempuan (Sadigov, 2023).



Gambar 1.1 Pertumbuhan Penduduk

Sumber:(UNFPA, 2024c)

Angka-angka ini menunjukkan bahwa populasi dunia meningkat setiap tahunnya dan diasumsikan akan memperoleh 8 miliar jiwa ditahun 2023. Populasi dunia meningkat tujuh kali lipat hanya dalam 200 tahun, menurut Dana Kegiatan Kependudukan PBB (UNFPA). Butuh ratusan ribu tahun untuk populasi dunia agar memperoleh satu miliar. Populasi dunia melampaui tujuh miliar pada bulan November 2011 dan delapan miliar pada bulan November 2022. Jumlah individu yang hidup hingga usia reproduksi merupakan faktor utama dalam peningkatan yang luar biasa ini, yang juga diikuti oleh modifikasi signifikan dalam tingkat kesuburan, peningkatan urbanisasi, dan migrasi yang meluas. Generasi mendatang akan sangat terkena dampak dari kecenderungan ini. Sebagai salah satu sponsor terbesar pengumpulan data kependudukan di seluruh dunia, UNFPA

membantu negara-negara dalam mengenali dan memahami perubahan-perubahan ini, yang penting bagi pembangunan (UNFPA, 2024d).

Tentu saja beberapa negara dengan jumlah penduduk yang luar biasa besar telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan yang sangat cepat dalam jumlah penduduk global. Data yang diterbitkan oleh UNFPA menunjukkan bahwa, dibandingkan dengan negara-negara lain, Tiongkok akan memiliki populasi terbesar pada tahun 2022. Tiongkok adalah rumah bagi setidaknya 1,43 miliar orang, atau 17,88% dari total populasi dunia. Sementara itu, India menempati peringkat kedua di dunia dengan jumlah penduduk 1,42 miliar jiwa atau 17,77% dari total penduduk. Amerika Serikat dengan jumlah penduduk 340 juta jiwa, Indonesia dengan jumlah penduduk 280 juta jiwa, Pakistan dengan jumlah penduduk 240 juta jiwa, dan beberapa negara lain menyusul. lainnya, yang didistribusikan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Populasi Di Benua

Major Area	Population (Miliar)			
	2011	2022	2037	2058
Asia Timur dan Tenggara	2,2	2,34	2,39	2,65
Asi Tengah dan Selatan	1,83	2,08	2,37	2,39
Sub-Sahara Afrika	1,09	1,17	1,65	2,23
Eropa dan Amerika Utara	0,87	1,12	1,13	1,11

Amerika Latin dan Karabia	0,60	0,66	0,72	0,82
Afrika Utara dan Asia Barat	0,45	0,55	0,68	0,75
Australia dan Selandia Baru	0,03	0,03	0,04	0,04
Oseania	0,01	0,01	0,02	0,02

Sumber:(UNFPA, 2024b)

Statistik saat ini menunjukkan bahwa populasi dunia akan terus bertambah secara signifikan dan mungkin mencapai 10 miliar orang pada tahun 2058. Menurut laporan UNFPA, populasi dunia akan terus bertambah pesat antara tahun 2011 dan 2058, kecuali Oseania, Australia, dan New Zealand. Selandia. Dengan perkiraan jumlah penduduk sebesar 2,65 miliar jiwa pada tahun 2058, Asia Timur dan Tenggara merupakan wilayah yang mengalami pertumbuhan populasi tercepat. Tentu saja, kontribusi Tiongkok—dengan kuantitas jiwa terbanyak di dunia—tidak bisa dipisahkan dari besarnya jumlah penduduk di Asia Timur dan Tenggara.

Namun pada tahun 2023, posisi Tiongkok dengan kuantitas jiwa terbanyak di dunia harus tergeser oleh India, dimana Tiongkok dan India yang memiliki jumlah penduduk yang sama yaitu 1,43 miliar jiwa, akan terus terpaut jauh pada tahun 2037 dengan total penduduk sebanyak 1,43 miliar jiwa. 1,39 miliar untuk Tiongkok dan 1,59 miliar untuk India. Sedangkan pada tahun 2058, jumlah tersebut akan semakin bertambah, yaitu 1,69 miliar di India dan 1,23 miliar di China. Tiongkok dan India sama-sama memiliki populasi 1,43 miliar jiwa, namun pada tahun 2023, Tiongkok harus memberi jalan bagi India sebagai kuantitas jiwa terbanyak di dunia. Pada tahun 2037, Tiongkok dan India masih akan berjauhan, masing-masing berjumlah 1,39 miliar jiwa dan 1,59 miliar jiwa. Akan tetapi,

pada tahun 2058, angka ini akan semakin meningkat, dengan 1,69 miliar di antaranya berasal dari India dan 1,23 miliar berasal dari Tiongkok (Wibawa & Arisanto, 2019).

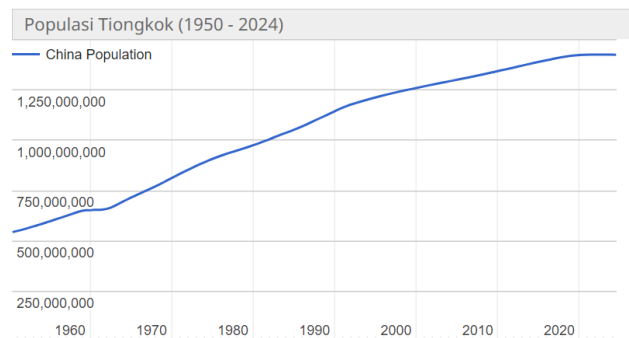
Isu ledakan penduduk di berbagai belahan dunia kemudian disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang pesat tersebut. Menurut PBB, dampak ledakan populasi global akan menyebabkan ketidakseimbangan alam dan menimbulkan ancaman jangka panjang bagi keberadaan manusia. Paradigma baru yang menuntut pembatasan dan kendali atas keberadaan manusia telah tergerak oleh isu-isu yang ditimbulkan oleh peningkatan populasi ini. Karena potensi ancaman terhadap kehidupan manusia di dalam wilayah kedaulatannya, pemerintah di seluruh dunia menjadi semakin khawatir terhadap pertumbuhan populasi (Huang et al., 2020a).

Masalah keamanan manusia akibat peningkatan populasi menimbulkan bahaya dalam lingkungan tertentu. Ancaman terhadap kehidupan manusia yang secara langsung mempengaruhi keamanan manusia sering kali mencakup hal-hal seperti isu lingkungan, kekurangan pangan, keburukan dalam kesehatan, tuna karya, aktivitas kejahatan, kerusuhan kemasyarakatan, kemelaratan, dan berbagai isu lainnya. Banyak negara dengan jumlah penduduk yang cukup besar, seperti Tiongkok, India, dan India, terkena dampak kekhawatiran ini. Tiongkok adalah salah satu negara yang sedang menghadapi masalah ledakan populasi yang signifikan.

Hingga saat ini, di dunia, Tiongkok masih menjadi negara dengan kuantitas jiwa terbanyak. Menurut catatan, Tiongkok akan menjadi tuan rumah bagi 17,72% populasi dunia pada tahun 2023. Populasi Tiongkok yang besar menimbulkan sejumlah kekhawatiran, seperti meningkatnya angka kemiskinan, pengangguran, degradasi lingkungan, kekurangan sumber daya alam, kejahatan, dan kekhawatiran lainnya, semuanya sangat menghambat kemajuan ekonomi (Huang et al., 2020b).

Karena tingginya kepadatan penduduk di negara ini, isu meledaknya masyarakat di Tiongkok sudah menyebabkan kekhawatiran untuk memperoleh resolusi pembangunannya. Populasi Tiongkok diperkirakan berjumlah 1,43 miliar pada tahun 2023

berdasarkan data statistik terbaru PBB, dan wilayah negara ini mencakup wilayah seluas 9.388.211 km². Artinya, kepadatan penduduk Tiongkok pada tahun 2023 adalah 152 km², atau 393 orang per mi². Tidak diragukan lagi, kepemimpinan Tiongkok memandang populasi yang sangat besar ini sebagai penghalang untuk mencapai tujuan pembangunan negaranya (Peng, 2023a).



Gambar 1.2 Populasi Tiongkok 1950 – 2024

Sumber: (Peng, 2023b)

Kemajuan alur pertumbuhan jiwa di Tiongkok kini sebuah prioritas fundamental pemerintah untuk memajukan kondisi kehidupan dan mencapai fundamental dalam pembangunan. Terdapat fase perubahan dalam pertumbuhan penduduk Tiongkok, dengan lonjakan yang mencolok pada tahun 1960an dan 1970an dan keberhasilan dalam menekan tren tersebut setelahnya. Tiongkok telah menghadapi masalah mendasar mengenai jumlah penduduknya sejak Deng Xiaoping menjabat. Kehidupan mereka sangat dipengaruhi oleh padatnya populasi mereka baik dari segi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Penduduk Tiongkok tidak mendapat perhatian yang sama dari pemerintah, dan kemiskinan meningkat akibat tingkat pendapatan yang tidak sebanding dengan jumlah keluarga (Teng et al., 2022a).

Pada tahun 1979, strategi pengendalian populasi Tiongkok awalnya disebut sebagai kebijakan Satu Anak. Pembangunan dan peningkatan kondisi kehidupan Tiongkok sangat terbantu oleh program ini. Di bawah periode Deng Xiaoping, pemerintah Tiongkok memberlakukan kebijakan yang membatasi jumlah anak yang boleh dimiliki setiap

keluarga menjadi satu. Artinya, ada kuota kelahiran yang berarti setiap perempuan hanya diperbolehkan melahirkan satu anak (Teng et al., 2022b).

Namun, kebijakan satu anak resmi dihentikan pada tahun 2015. Namun efektivitas kebijakan ini masih menjadi perdebatan karena pertumbuhan penduduk biasanya melambat seiring dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, seperti yang terjadi di Tiongkok saat ini. Di Tiongkok, selain angka kelahiran menurun, angka kematian juga menurun dan angka harapan hidup meningkat (Hayes, 2023).

Pada tanggal 27 Desember 2015, Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Tiongkok (NPC) memutuskan untuk mengubah Undang-Undang Kependudukan dan Keluarga Berencana. Mulai 1 Januari 2016, "kebijakan dua anak" diberlakukan secara nasional. (Zhonghua Renmin Gongheguo Renkou yu Jihua Shengyu Fa [Hukum Kependudukan dan Keluarga Berencana Republik Rakyat Tiongkok] (UU 2015) (ditetapkan oleh Komite Tetap NPC pada tanggal 29 Desember 2001, efektif tanggal 1 September 2002, diubah pada tanggal 27 Desember 2015, efektif 1 Januari 2016), situs web Pemerintah Rakyat Pusat.) ("Population and Family Planning Law of the People's Republic of China," 2015).

Oleh karena itu, Pada 18th Communist Party of China (CPC) Central Committee's Third Plenary Session, diputuskan "kebijakan dua anak" bagi pasangan yang masih berstatus anak tunggal atau kebijakan dua anak selektif akan segera dilaksanakan. Pada tahun November 2015, diumumkan pada Sidang Pleno Kelima Komite Sentral CPC ke-18 bahwa kebijakan dua anak untuk semua pasangan akan diterapkan. Dengan kata lain, masa transisi dua tahun sudah cukup bagi Tiongkok untuk menyelesaikan penyesuaian dari kebijakan satu anak ke kebijakan universal dua anak. Penyesuaian kebijakan pengendalian kelahiran pada periode ini dimaksudkan tidak hanya untuk beradaptasi dengan perubahan situasi demografis, namun yang lebih penting adalah beradaptasi dengan perbaikan institusi sosial dan masuknya perekonomian Tiongkok ke fase "normal baru". Penyesuaian ini akan berdampak luas tidak hanya pada perubahan demografis di Tiongkok namun juga pada

struktur keluarga setempat. Kami akan memulai dengan menyajikan latar belakang sejarah dan situasi demografis di mana kebijakan universal dua anak diperkenalkan, implikasi demografisnya, dan harapan kami terhadap kebijakan ini di masa depan (Zhang & Yang, 2019).

Selain menerapkan kebijakan pemerintah daerah, ada pihak eksternal yang juga membantu Tiongkok dalam menekan laju pertumbuhan penduduk di negaranya, yaitu UNFPA. Yang terbaru, UNFPA bekerja sama dengan Pemerintah Tiongkok untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk Tiongkok sebagaimana tertuang dalam CPD Tiongkok (2021-2025) (DP/FPA/CPD/CHI/9) yang mengedepankan sejumlah program seperti memutuskan kejahatan berdasarkan gender, praktik-praktik berbahaya, memberhentikan kasus kematian ibu yang bisa ditangani, memberhentikan kepentingan keluarga berencana yang tidak terlaksana.

Dari UNFPA pun terdapat tanggapan mengenai *Two Child Policy* yaitu dari Direktur Eksekutif, UNFPA, Dana Kependudukan PBB, Dr. Babatunde Osotimehin:

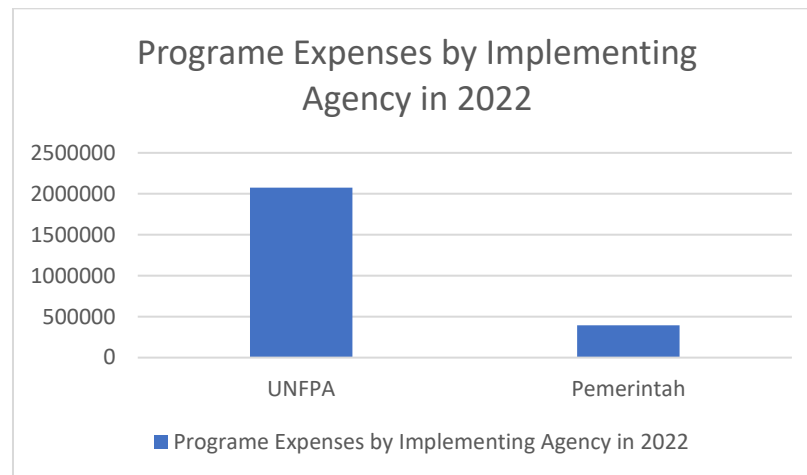
“UNFPA, Dana Kependudukan PBB, mencatat pengumuman penting dari Pemerintah Tiongkok bahwa pasangan di seluruh negeri kini dapat memiliki dua anak, mengabaikan kebijakan satu anak yang diterapkan lebih dari 30 tahun yang lalu.

UNFPA juga mencatat bahwa selain perubahan kebijakan ini, Pemerintah Tiongkok berencana untuk memperkuat dan meningkatkan layanan publik, termasuk kesehatan reproduksi, layanan kesehatan ibu dan anak, serta layanan pembibitan.

UNFPA berharap bahwa langkah-langkah ini akan memenuhi hak dasar semua pasangan dan individu di Tiongkok untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah, jarak dan waktu kelahiran anak-anak mereka, sesuai dengan prinsip-prinsip yang disepakati oleh semua negara di dunia. Program Aksi yang diadopsi pada Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) di Kairo pada tahun 1994.

Kami di UNFPA berkomitmen untuk bekerja sama dengan Pemerintah Tiongkok untuk mempromosikan dan memperkuat kesehatan seksual dan reproduksi serta hak-hak reproduksi seluruh rakyat Tiongkok, khususnya perempuan dan generasi muda.”

Untuk menunjang suksesnya program kerjasama kedua pihak, sejumlah dana telah digelontorkan, sejumlah:



Gambar 1.3 Programme Expenses By Implementing Agency In 2022

Sumber:(UNFPA, 2024a)

Mandat UNFPA ditetapkan oleh *United Nations Economic and Social Council* (ECOSOC) pada tahun 1973 yang ditegaskan kembali pada tahun 1993, diantaranya meliputi:

- 1) Untuk membentuk pengetahuan dan kapasitas bagi negara-negara berkembang dalam menanggapi kebutuhan pengendalian populasi dan keluarga berencana;
- 2) Untuk mempromosikan kesadaran baik negara maju dan negara berkembang terkait masalah kependudukan dan mempromosikan strategi yang memungkinkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

- 3) Untuk memberi bantuan bagi negara berkembang terkait permasalahan kependudukan di negara tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan dan mengedepankan kepentingan negara tersebut;
- 4) Untuk menjadi pemeran utama dalam sistem PBB dalam mempromosikan program kependudukan dan melakukan koordinasi terkait proyek kependudukan yang didukung penuh oleh UNFPA.

Adanya kolaborasi yang dibangun antara Tiongkok dengan UNFPA sejak 1979 dengan beragam bentuk program mengarahkan penulisan dengan fokus pembahasan berupa **“Kontribusi United Nation Fund For Population Activities (UNFPA) Melalui Two Child Policy Dalam Meminimalisir Overpopulasi Di Tiongkok”**

1.2 Rumusan Masalah

Penetapan terhadap polemik yang dibawakan dalam penelitian menghasilkan sejumlah pertanyaan penelitian, berupa **“Bagaimana Kontribusi United Nation Fund For Population Activities (UNFPA) Melalui Two Child Policy Dalam Meminimalisir Overpopulasi Di Tiongkok?”**

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah penulis jelaskan, maka penulis butuh membatasi masalah agar pembahasan dalam penelitian ini bisa terfokus untuk hal esensial dalam inti permasalahan yang nantinya dibahas. Penulis fokus pada permasalahan internal mengenai upaya yang dilakukan UNFPA yang dilaksanakan bersama Pemerintah Tiongkok sebagai upaya meminimalisir overpopulasi di Tiongkok. Jadi gambaran itulah yang membatasi permasalahan, para aktor yang nantinya diteliti adalah berupa *state* tentang kontribusi untuk menanggulangi overpopulasi. Ruang lingkup yang akan dibahas dalam

penelitian ini termasuk ruang lingkup internasional. Dianggap berskala internasional karena dalam hal ini melibatkan organisasi internasional. Dan batasan waktu penelitian ini adalah tahun 2018 sampai dengan 2022.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk memastikan bahwa penelitian ini tetap konsisten dengan rumusan masalah dan batasan masalah yang telah penulis rumuskan diawal. Sesuai kebutuhan, penulis memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memahami program UNFPA bersama Pemerintah Tiongkok dalam meminimalisir overpopulasi
2. Untuk mengetahui overpopulasi di Tiongkok
3. Untuk mengetahui pelaksanaan program yang dilakukan oleh UNFPA dalam meminimalisir overpopulasi yang dihadapi Tiongkok

1.4.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian diperlukan untuk memberikan penjelasan bagaimana manfaat yang akan diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Kegunaan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan ilmu pengetahuan dalam pengembangan kajian Hubungan Internasional khususnya Organisasi Internasional;

2. Secara Empiris, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai jembatan dalam memberikan ilmu pengetahuan untuk pengembangan kajian Hubungan Internasional, khususnya Organisasi Internasional;
3. Secara Praktis, untuk memenuhi salah satu prasyarat kelulusan mata kuliah skripsi dalam program studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pasundan;
4. Secara akademik, hasil penelitian ini diharapkan bisa memenuhi pengetahuan dalam studi Hubungan Internasional, khususnya mengenai Organisasi Internasional.